

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui relasi antar etnis dan kendala yang dihadapi oleh Tionghoa dan Melayu dalam Pemilu 2013 di Tanjungpandan/Belitung dapat disimpulkan bahwa:

1. Relasi antar etnis Tionghoa dan Melayu dalam pemilu 2013

Hubungan antar kedua etnis Melayu dan Tionghoa dalam pemilu 2013 berjalan harmonis meski sentimen dan opini negatif diantara keduanya belum hilang sempurna. Warga Tionghoa mengharapkan sikap toleransi antar penduduk untuk diberi kesempatan bisa dipimpin dari sama suku/etnisnya, sebaliknya Melayu tidak sulit menerima pemimpin daerah dengan etnis Tionghoa/Cina dengan ketentuan Islam sebagai agama yang dianut. Pemilu sempat memberikan jarak diantara berbagai pihak, meski demikian keadaan kembali seperti semula setelah pemimpin daerah (Bupati dan Wakil Bupati) ditetapkan.

2. Kendala oleh etnis Tionghoa dan Melayu dalam Pemilu 2013

a. Masyarakat kurang mengenal calon

Tidak setiap nama calon bisa segera dikenali oleh masyarakat, hanya nama-nama tertentu yang biasanya sudah akrab dengan telinga masyarakat.

b. Sosialisasi visi dan misi yang tidak menarik

Warga akan merasa tidak nyaman dan tidak akan bertahan lama hadir dalam sosialisasi jika tidak ada hal yang menarik untuk ditunggu pada acara penyampaian visi dan misi.

c. Sosialisasi pencoblosan tidak merata

Banyak diantara masyarakat dengan berbagai kendala tersendiri seperti baru pertama kali mencoblos, lupa caranya mencoblos, atau kendala lainnya, mereka (masyarakat) akan merasa terbebani jika tidak ada pembekalan cara mencoblos yang baik dan benar pada hari pencoblosan.

d. Elite politik dan politik uangnya

Bahayanya politik uang sebagai pemancing terhadap masyarakat untuk memilih dengan imbalan dan membudayakan sifat tidak jujur terhadap masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran dari berbagai kendala yang terjadi pada proses pilkada sebagai berikut:

1. Memaksimalkan upaya sosialisasi bagi peserta calon dan tim pengusung, dengan tidak memulainya pada saat ada kepentingan pilkada.
2. Perlunya evaluasi yang bijak setelah berakhir proses pilkada mengenai sosialisasi pencoblosan tidak merata, masyarakat kurang mengenal calon, sosialisasi visi/misi tidak menarik minat masyarakat dan kelemahan lainnya, guna menjadi acuan dan pembelajaran terhadap pilkada berikutnya.

3. Menciptakan metode, sikap taat aturan, dan sanksi hukum (wajib) bagi peserta pemilu jika melanggar komitmen. Kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pihak-pihak yang berwenang dalam merumuskan sistem dan aturan hukum pemilu serta kerjasama masyarakat tidak hanya aparat penegak hukum yang harus bertanggung jawab dalam meminimalisir politik uang.
4. Pemerintah harus berupaya melakukan pendekatan secara berkala terhadap paguyuban-paguyuban dan tokoh-tokoh masyarakat yang berperan menjadi pemimpin kelompoknya untuk tetap menciptakan kehidupan bermasyarakat yang ideal di Belitung.